



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa sehubungan adanya peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut tahun 2008 Nomor 38), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Garut.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Zona Parkir adalah wilayah parkir yang ditentukan berdasarkan frekuensi kendaraan yang parkir pada satu lokasi.
15. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
17. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
18. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Pengujian Berkala adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor serta pengesahan hasil uji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.
22. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah/pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
23. Alat Perlengkapan Pemadam adalah suatu alat atau bahan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk melengkapi dirinya atau keselamatan kerja, antara lain baju tahan api, baju tahan panas, helmet, sarung tangan.
24. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

25. Pelayanan Laboratorium Kemetrolgian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera atau tera ulang alat-alat ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), kalibrasi UTTP serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang metrologi legal.
26. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
27. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku yang dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang sebelumnya telah/pernah ditera.
28. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
29. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
 - c. pelayanan kesehatan yang diberikan bagi penduduk miskin Kabupaten Garut yang tidak termasuk dalam kuota Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Lainnya yang sejenis di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling yang meliputi:
 1. rawat jalan umum;
 2. tindakan medik, yaitu:
 - a) suntikan;
 - b) perawatan luka ringan;
 - c) pemasangan IUD;
 - d) pemasangan implant;
 - e) pencabutan implant;

- f) vasektomi;
 - g) pemeriksaan dalam (toucher); dan
 - h) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak.
3. pemeriksaan penunjang diagnostik, yaitu:
- a) pemeriksaan air seni (urine):
 - 1) albumin (protein);
 - 2) reduksi;
 - 3) urobilin;
 - 4) bilirubin;
 - 5) sedimen (endapan); dan
 - 6) keasaman (ph).
 - b) pemeriksaan darah (haematologi):
 - 1) haemoglobin (Hb);
 - 2) hitung jasad leukosit;
 - 3) laju endap darah (LED);
 - 4) hitung jumlah leukosit;
 - 5) hitung jumlah eritrosit;
 - 6) hitung jumlah trombosit;
 - 7) waktu pendarahan;
 - 8) waktu pembekuan;
 - 9) pengamatan bentuk (morfologi darah); dan
 - 10) sediaan apus darah tebal (malaria).
 - c) pemeriksaan lain-lain, meliputi pemeriksaan dahak (sputum).
- (4) Bagi penduduk miskin Kabupaten Garut yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling, harus memiliki dan menunjukkan identitas.
- (5) Mekanisme pembebasan atau pengecualian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara ke lokasi pemrosesan akhir sampah; dan

- c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sarana sosial dan tempat umum lainnya.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemakaman mayat, yang meliputi:
- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Keenam

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempel yang dioperasikan di jalan, serta diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengganti biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengendalian pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

BAB IV
SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang diberikan, disediakan, dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis, diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan meliputi jasa medik dan non medik serta sarana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua**Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan****Pasal 16**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, diukur berdasarkan klasifikasi tempat, volume dan jarak pengangkutan.

Bagian Ketiga**Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat****Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaman mayat yang diberikan.

Bagian Keempat**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum****Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan penggunaan pelayanan jasa dengan memperhatikan jangka waktu penggunaan serta tingkat penggunaan sarana dan prasarana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan guna melindungi kepentingan umum.

Bagian Kelima**Retribusi Pelayanan Pasar****Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa dengan memperhatikan jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan serta jangka waktu penggunaan.

Bagian Keenam**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor****Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat pelayanan jasa yang diberikan seperti jasa pelayanan, penggunaan sarana dan prasarana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, serta fasilitas penunjang tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Bagian Ketujuh**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran****Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau digunakan oleh masyarakat.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 22

Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis peta, skala, ukuran kertas yang digunakan.

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan jasa pelayanan penyedotan kakus atau gangguan kakus dan jarak.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jasa pengujian dengan memperhatikan jenis alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 27

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana, yang ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis Pelayanan | Tarif |
|----|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rawat Jalan yang meliputi pemeriksaan anamnesa, fisik, diagnostik, terapi termasuk obat (tidak termasuk tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik serta oksigen) | |
| | a. Umum | Rp. 8.000,- |
| | b. UGD | Rp. 10.000,- |
| 2. | Rawat Inap satu hari termasuk obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk tindakan perawatan, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen) | Rp. 100.000,- |
| 3. | Pertolongan persalinan dengan tindakan, obat dan bahan habis pakai (tidak termasuk rawat inap, pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen) | |
| | a. persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas Poned | Rp. 300.000,- |
| | b. persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas Non Poned | Rp. 250.000,- |
| | c. persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas Poned | Rp. 400.000,- |
| | d. persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas Non Poned | Rp. 350.000,- |
| | e. persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter di Puskesmas Poned | Rp. 500.000,- |
| 4. | Tarif Tindakan Medik di rawat jalan umum, UGD dan rawat inap termasuk obat, alat dan bahan habis pakai. Tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen. (Observasi lebih dari 6 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari) | |
| | a. suntikan | Rp. 5.000,- |
| | b. pemasangan infus | Rp. 20.000,- |
| | c. perawatan luka ringan | Rp. 10.000,- |
| | d. perawatan luka berat | Rp. 20.000,- |
| | e. jahitan luka sampai dengan 3 (tiga) | Rp. 20.000,- |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---------------|
| | f. jahitan luka lebih dari 3 (tiga) per jahit ditambah | Rp. 5.000,- |
| | g. sayatan (incisi/excisi) | Rp. 20.000,- |
| | h. ekstraksi kuku kaki/tangan | Rp. 30.000,- |
| | i. pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan jahit sampai 3 (tiga) | Rp. 50.000,- |
| | j. buka jahitan sampai dengan 3 (tiga) | Rp. 5.000,- |
| | k. buka jahitan lebih dari 3 (tiga) perjahitan ditambah | Rp. 2.000,- |
| | l. khitan (sirkumsisi) metode gunting atau cauter | Rp. 150.000,- |
| | m. pembersihan kotoran telinga/hidung | Rp. 10.000,- |
| | n. pengangkatan benda asing (corpus alienum) | Rp. 15.000,- |
| | o. tindik telinga | Rp. 10.000,- |
| | p. sonde hidung (NGT) | Rp. 40.000,- |
| | q. bilas lambung | Rp. 15.000,- |
| | r. kateterisasi kandung kemih | Rp. 30.000,- |
| | s. lavement | Rp. 20.000,- |
| | t. resusitasi jantung dan paru (RJP) | Rp. 50.000,- |
| | u. pemasangan IUD | Rp. 30.000,- |
| | v. pencabutan IUD | Rp. 30.000,- |
| | w. pemasangan implant | Rp. 30.000,- |
| | x. pencabutan implant | Rp. 30.000,- |
| | y. vasektomi | Rp. 100.000,- |
| | z. pemeriksaan dalam (toucher) | Rp. 10.000,- |
| | aa. tampon hidung | Rp. 15.000,- |
| | bb. pembidaian (pasangan spalk) | Rp. 40.000,- |
| | cc. penambalan sementara untuk setiap 1 (satu) gigi | Rp. 20.000,- |
| | dd. penambalan permanen untuk setiap 1 (satu) gigi | Rp. 25.000,- |
| | ee. perawatan saraf gigi (endodontic) | Rp. 20.000,- |
| | ff. pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak topical | Rp. 15.000,- |
| | gg. pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak injeksi | Rp. 20.000,- |
| | hh. pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi dewasa tanpa penyulit | Rp. 25.000,- |
| | ii. pencabutan untuk setiap 1 gigi dewasa dengan penyulit | Rp. 75.000,- |
| | jj. pencabutan untuk setiap gigi M3 (odontectomy) | Rp. 100.000,- |
| | kk. operculectomy/gingivectomy | Rp. 100.000,- |
| | ll. alveolectomy | Rp. 100.000,- |
| | mm. fluoridasi/topical application | Rp. 15.000,- |
| | nn. pembersihan karang gigi untuk setiap ¼ bagian rahang (8 gigi) | Rp. 25.000,- |
| | oo. pramedikasi | Rp. 5.000,- |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|---|
| 5. | <p>Pemeriksaan Penunjang Diagnostik:</p> <p>a. Pemeriksaan Laboratorium</p> <p>1) Patologi</p> <p>a) Kimia Klinik</p> <p>(1) Albumin</p> <p>(2) gamma GT</p> <p>(3) phosphatase alkali</p> <p>(4) protein total</p> <p>(5) SGOT</p> <p>(6) SGPT</p> <p>(7) asam urat</p> <p>(8) kreatinin</p> <p>(9) ureum</p> <p>(10) kolesterol total</p> <p>(11) kolesterol HDL</p> <p>(12) kolesterol LDL</p> <p>(13) trigliserida</p> <p>(14) glukosa</p> <p>b) Hematologi</p> <p>(1) Hematokrit</p> <p>(2) leukosit (hitung jumlah)</p> <p>(3) trombosit (hitung jumlah)</p> <p>(4) hitung jenis leukosit</p> <p>(5) jumlah eritrosit</p> <p>(6) laju endap darah</p> <p>(7) hemoglobin</p> <p>(8) retraksi bekuan</p> <p>(9) waktu pendarahan (BT)</p> <p>(10) waktu pembekuan (CT)</p> <p>c) Urinalisis</p> <p>(1) Makroskopis</p> <p>(a) warna/kejernihan</p> <p>(b) BJ</p> <p>(c) PH</p> <p>(2) Mikroskopis</p> <p>Sedimen</p> <p>(3) Urine Kimiawi</p> <p>(a) Keton</p> <p>(b) Bilirubin</p> | <p>Rp. 16.500,-</p> <p>Rp. 31.000,-</p> <p>Rp. 22.000,-</p> <p>Rp. 12.000,-</p> <p>Rp. 12.000,-</p> <p>Rp. 12.000,-</p> <p>Rp. 12.000,-</p> <p>Rp. 11.000,-</p> <p>Rp. 11.000,-</p> <p>Rp. 11.000,-</p> <p>Rp. 16.500,-</p> <p>Rp. 22.000,-</p> <p>Rp. 25.000,-</p> <p>Rp. 12.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 5.000,-</p> <p>Rp. 8.000,-</p> <p>Rp. 7.000,-</p> <p>Rp. 7.000,-</p> <p>Rp. 3.500,-</p> <p>Rp. 3.500,-</p> <p>Rp. 3.500,-</p> <p>Rp. 9.000,-</p> <p>Rp. 5.500,-</p> <p>Rp. 5.500,-</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---------------|
| | (c) Glukosa | Rp. 7.000,- |
| | (d) Protein | Rp. 5.500,- |
| | (e) Urobilinogen | Rp. 5.500,- |
| | d) Tinja | |
| | (1) warna, lendir, darah | Rp. 11.000,- |
| | (2) darah samar | Rp. 25.500,- |
| | (3) sisa pencernaan | Rp. 11.000,- |
| | (4) telur cacing | Rp. 14.500,- |
| | (5) amuba | Rp. 14.500,- |
| | 2) Toksikologi | |
| | a) Amphetamine | Rp. 25.000,- |
| | b) THC | Rp. 25.000,- |
| | c) Morfin | Rp. 25.000,- |
| | d) Benzodiazepin | Rp. 25.000,- |
| | e) Methamphetamine | Rp. 25.000,- |
| | f) Barbiture | Rp. 25.000,- |
| | g) Coccaïn | Rp. 25.000,- |
| | h) paket screening narkoba | Rp. 115.000,- |
| | 3) Mikrobiologi | |
| | a) BTA (mycobacterium tuberculose) | Rp. 12.000,- |
| | b) BTA (mycobacterium leprae) | Rp. 12.000,- |
| | c) diplococcus gram negative (neisseria gonorrhoe) | Rp. 11.000,- |
| | d) mikrofilaria | Rp. 15.500,- |
| | e) parasit saluran pencernaan | Rp. 11.000,- |
| | f) jamur permukaan | Rp. 9.000,- |
| | g) coliform | Rp. 30.000,- |
| | h) E. Coli | Rp. 30.000,- |
| | i) salmonella spp | Rp. 60.500,- |
| | j) syphilis | Rp. 33.000,- |
| | k) chikungunya | Rp. 176.000,- |
| | 4) Imunologi | |
| | a) tes kehamilan | Rp. 12.000,- |
| | b) golongan darah | Rp. 5.000,- |
| | c) widal | Rp. 20.000,- |
| | d) VDRL | Rp. 18.000,- |
| | e) HbsAg | Rp. 27.500,- |
| | f) anti HCV | Rp. 35.000,- |
| | g) anti HIV | Rp. 55.000,- |
| | h) NS1 dengue | Rp. 250.000,- |
| | i) influenza A dan B ag | Rp. 126.500,- |

| 1 | 2 | 3 |
|---|------------------------------------|-----------------|
| | j) malaria Pf/P.v rapid tes Ab | Rp. 52.000,- |
| | k) malaria Pf/P.v rapid tes Ag | Rp. 63.000,- |
| | 5) Kimia Kesehatan | |
| | a) Kimia Lingkungan (AM/AB/AL/AKR) | |
| | (1) Fisika | |
| | (a) Bau | Rp. 3.500,- |
| | (b) Warna | Rp. 3.500,- |
| | (c) jumlah zat padat terlarut | Rp. 7.000,- |
| | (d) kekeruhan | Rp. 7.000,- |
| | (e) rasa | Rp. 3.500,- |
| | (f) suhu | Rp. 6.500,- |
| | (g) kejernihan | Rp. 3.500,- |
| | (2) Kimia | |
| | (a) Arsen | Rp. 161.000,- |
| | (b) Fluorida | Rp. 36.000,- |
| | (c) kromium Val-6 | Rp. 176.000,- |
| | (d) kadmium | Rp. 74.000,- |
| | (e) nitrit sbg-N | Rp. 9.000,- |
| | (f) nitrat sbg-N | Rp. 35.000,- |
| | (g) sianida | Rp. 220.000,- |
| | (h) selenium | Rp. 77.000,- |
| | (i) alumunium | Rp. 47.500,- |
| | (j) besi | Rp. 15.000,- |
| | (k) kesadahan | Rp. 22.000,- |
| | (l) khlorida | Rp. 20.000,- |
| | (m) mangan | Rp. 25.000,- |
| | (n) Ph | Rp. 10.000,- |
| | (o) Seng | Rp. 55.000,- |
| | (p) Sulfat | Rp. 20.000,- |
| | (q) Tembaga | Rp. 55.000,- |
| | (r) sisa khlor | Rp. 40.000,- |
| | (s) amonia | Rp. 36.500,- |
| | (t) COD | Rp. 92.500,- |
| | (u) BOD/DO/oksigen terabsorbsi | Rp. 11.000,- |
| | (v) paket air bersih (air minum) | Rp. 250.000,- |
| | (w) paket air kolam renang | Rp. 220.000,- |
| | (x) paket air buangan | Rp. 1.490.000,- |
| | b) Kimia Bahan Makanan | |
| | (1) asam borat | Rp. 55.000,- |
| | (2) benzoat | Rp. 55.000,- |

| 1 | 2 | | 3 |
|----|--|-----|-----------|
| | (3) bilangan iod adisi menurut Wijs | Rp. | 55.000,- |
| | (4) bilangan penyabunan | Rp. | 55.000,- |
| | (5) bilangan peroksida | Rp. | 55.000,- |
| | (6) boraks | Rp. | 66.000,- |
| | (7) derajat asam | Rp. | 55.000,- |
| | (8) formalin | Rp. | 66.000,- |
| | (9) kadar abu | Rp. | 27.500,- |
| | (10) kadar air | Rp. | 27.500,- |
| | (11) kadar asam laktat | Rp. | 55.000,- |
| | (12) kadar etanol | Rp. | 27.500,- |
| | (13) kadar fruktosa | Rp. | 55.000,- |
| | (14) kadar garam | Rp. | 55.000,- |
| | (15) kadar glukosa | Rp. | 55.000,- |
| | (16) kadar gula invert | Rp. | 55.000,- |
| | (17) kadar gula total | Rp. | 55.000,- |
| | (18) kadar karbohidrat | Rp. | 55.000,- |
| | (19) kadar KIO ₃ | Rp. | 55.000,- |
| | (20) kadar laktosa | Rp. | 55.000,- |
| | (21) kadar lemak | Rp. | 82.500,- |
| | (22) kadar maltosa | Rp. | 55.000,- |
| | (23) kadar pati/amilum/polisakarida | Rp. | 275.000,- |
| | (24) kadar protein | Rp. | 82.500,- |
| | (25) kadar sakarosa | Rp. | 55.000,- |
| | (26) kadar serat | Rp. | 55.000,- |
| | (27) kadar vitamin C/asam karbonat | Rp. | 55.000,- |
| | (28) kalori paket : protein, lemak karbohidrat, kalori | Rp. | 467.500,- |
| | (29) kimia singkat (ph, As, Cn, logam berat, nitrit) | Rp. | 82.500,- |
| | (30) natrium bikarbonat | Rp. | 55.000,- |
| | (31) sakarin | Rp. | 55.000,- |
| | (32) siklamat | Rp. | 27.500,- |
| | (33) test ketengikan | Rp. | 55.000,- |
| | (34) zat warna | Rp. | 82.500,- |
| b. | Pemeriksaan Foto Rontgen | | |
| | 1) film besar | Rp. | 60.000,- |
| | 2) film kecil | Rp. | 50.000,- |
| | 3) film gigi | Rp. | 25.000,- |
| c. | Pemeriksaan Ultrasonographi (USG) | Rp. | 50.000,- |
| d. | Pemeriksaan Elektrokardiographi (EKG) | Rp. | 50.000,- |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---------------|
| | e. Nebulisasi | Rp. 50.000,- |
| | f. Tes Spirometri | Rp. 40.000,- |
| | g. Pemakaian Oksigen/tabung | |
| | 1) tabung besar | Rp. 180.000,- |
| | 2) tabung sedang | Rp. 120.000,- |
| | 3) tabung kecil | Rp. 75.000,- |
| | h. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat-tempat umum, tidak termasuk pemeriksaan laboratorium | |
| | 1) hotel berbintang | Rp. 250.000,- |
| | 2) hotel tidak berbintang | Rp. 150.000,- |
| | 3) penginapan | Rp. 100.000,- |
| | 4) kolam renang | Rp. 100.000,- |
| | 5) pengembangan perumahan | Rp. 200.000,- |
| | 6) salón | Rp. 100.000,- |
| | 7) spa | Rp. 150.000,- |
| | 8) pangkas rambut | Rp. 20.000,- |
| | 9) supermarket | Rp. 250.000,- |
| | 10) minimarket | Rp. 100.000,- |
| | 11) penggilingan padi/huller | Rp. 100.000,- |
| | 12) toko kecantikan | Rp. 100.000,- |
| | 13) sarana pelayanan kesehatan swasta | |
| | a) apotek | Rp. 150.000,- |
| | b) toko obat | Rp. 100.000,- |
| | c) klinik pratama rawat jalan (balai pengobatan) | Rp. 100.000,- |
| | d) klinik pratama rawat jalan dan rawat inap | Rp. 250.000,- |
| | e) klinik utama/klinik spesialis rawat jalan | Rp. 150.000,- |
| | f) klinik utama rawat jalan dan rawat inap (RB) | Rp. 400.000,- |
| | g) rumah sakit type A dan type B | Rp. 700.000,- |
| | h) rumah sakit type C dan type D | Rp. 500.000,- |
| | i) laboratorium klinik | Rp. 150.000,- |
| | j) klinik rontgen | Rp. 150.000,- |
| | k) praktek dokter umum | Rp. 100.000,- |
| | l) praktek dokter gigi | Rp. 100.000,- |
| | m) praktek dokter spesialis | Rp. 150.000,- |
| | n) pengobatan komplementer alternatif | Rp. 100.000,- |
| | o) praktek bidan | Rp. 100.000,- |
| | p) praktek perawat | Rp. 100.000,- |
| | q) praktek fisioterapi | Rp. 100.000,- |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|-------------------------|
| | r) toko optical | Rp. 150.000,- |
| | s) toko kacamata | Rp. 100.000,- |
| | t) pengobatan tradisional | Rp. 75.000,- |
| | h. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan makan/restoran (belum termasuk pemeriksaan laboratorium) | |
| | 1) rumah makan | |
| | a) besar | Rp. 250.000,- |
| | b) sedang | Rp. 150.000,- |
| | 2) cafetaria | Rp. 150.000,- |
| | 3) kantin | Rp. 50.000,- |
| | 4) warung | |
| | a) mie baso/mie ayam | Rp. 50.000,- |
| | b) warung nasi dan sejenisnya | Rp. 25.000,- |
| | 5) jasa boga | Rp. 150.000,- |
| | i. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi industri (belum termasuk pemeriksaan laboratorium} | |
| | 1) industri besar | Rp. 400.000,- |
| | 2) industri menengah | Rp. 200.000,- |
| | 3) industri kecil | Rp. 50.000,- |
| | j. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi depot air minum isi ulang (belum termasuk pemeriksaan laboratorium) | Rp. 50.000,- |
| 6. | Pengujian Kesehatan/keuring (tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan jenis pelayanan kesehatan lainnya) | |
| | a. melanjutkan pendidikan | Rp. 5.000,- |
| | b. melamar pekerjaan | Rp. 10.000,- |
| | c. pemeriksaan kesehatan haji | Rp. 100.000,- |
| | d. mengikuti asuransi | Rp. 20.000,- |
| | e. pemeriksaan/tes kebugaran | Rp. 20.000,- |
| | f. tes buta warna | Rp. 5.000,- |
| 7. | Pemeriksaan Visum Et Repertum Pro Justicia untuk pemeriksaan luar | Rp. 50.000,- |
| 8. | Penggunaan ambulance mobil puskesmas (belum termasuk pembelian bahan bakar minyak/BBM) | |
| | a. pengangkutan pasien dengan jarak tempuh s/d 10 km | Rp. 75.000,- |
| | b. pengangkutan jenazah dengan jarak tempuh s/d 10 km | Rp. 100.000,- |
| | c. jarak tempuh lebih dari 10 km ditambah | Rp. 3.000/km |
| | d. pendamping tenaga dokter | Rp. 100.000,- /orang |
| | e. pendamping tenaga perawat/bidan | Rp. 50.000,-/orang |

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Tarif = indeks jarak x tarif sampah

- (3) Indek jarak dan tarif sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

a. indeks jarak

| | | | | |
|----|---|-------|---|---|
| 0 | - | 15 km | = | 1 |
| 16 | - | 30 km | = | 2 |
| 31 | - | 45 km | = | 3 |
| 46 | - | 60 km | = | 4 |
| 61 | - | 75 km | = | 5 |
| 76 | - | 90 km | = | 6 |
| | > | 91 km | = | 7 |

b. tarif sampah

1. dibayar bulanan

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| a) Rumah Tinggal | | |
| 1) Rumah Mewah | Rp. | 10.000,- |
| 2) Rumah Sederhana | Rp. | 5.000,- |
| b) Warung/Kios | | |
| 1) di tepi jalan arteri/kolektor | Rp. | 10.000,- |
| 2) di tepi jalan lokal | Rp. | 7.500,- |
| 3) di tepi jalan lingkungan | Rp. | 5.000,- |
| c) Rumah Makan | | |
| 1) Kecil | Rp. | 15.000,- |
| 2) Sedang | Rp. | 20.000,- |
| 3) Besar | Rp. | 60.000,- |
| d) Bengkel, Gudang, Home Industri dan Tempat Usaha Lainnya | | |
| 1) di tepi jalan arteri/kolektor | Rp. | 60.000,- |
| 2) di tepi jalan lokal | Rp. | 20.000,- |
| 3) di tepi jalan lingkungan | Rp. | 15.000,- |
| e) Industri, Pabrik dan sejenisnya | Rp. | 30.000/m ³ |
| f) Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan | | |
| 1) Pasar | Rp. | 75.000/m ³ |
| 2) Pusat Perbelanjaan | Rp. | 30.000/m ³ |
| 3) Toko Swalayan/Minimarket | Rp. | 40.000/m ³ |
| g) Wisma, Penginapan, Losmen, Bioskop dan sejenisnya | Rp. | 40.000,- |
| h) Sarana Olah Raga | Rp. | 25.000,- |

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| i) Perhotelan | | |
| 1) Hotel Bintang Lima | Rp. | 100.000,- |
| 2) Hotel Bintang Empat | Rp. | 75.000,- |
| 3) Hotel Bintang Tiga | Rp. | 50.000,- |
| j) Perkantoran | Rp. | 15.000,- |
| k) Rumah Sakit | Rp. | 30.000/m ³ |
| l) Rumah Bersalin, Praktek Dokter, Klinik, Puskesmas dan sejenisnya | Rp. | 100.000,- |
| m) Perbankan | | |
| 1) Kantor Utama | Rp. | 50.000,- |
| 2) Kantor Cabang/Pembantu | Rp. | 40.000,- |
| m) Lembaga Pendidikan | Rp. | 20.000,- |
| n) Perusahaan Angkutan | Rp. | 30.000,- |
| 2. dibayar harian | | |
| Pesta hajatan, pesta umum dan sejenisnya | | |
| a) di gedung | Rp. | 50.000,- |
| b) di rumah tinggal | Rp. | 25.000,- |
| 3. Dibayar sesuai permintaan | | |
| a) tarif pengangkutan/m ³ | Rp. | 70.000,- |
| b) tarif atas jarak pengangkutan dikenakan biaya tambahan: | | |
| 1) 10 – 15 km | Rp. | 30.000,- |
| 2) 16 – 30 km | Rp. | 70.000,- |
| 3) 31 – 45 km | Rp. | 105.000,- |
| 4. Pembuangan yang langsung ke TPA/m³ | Rp. | 200.000,- |
| 5. Pelayanan Pengadaan/Sewa Penyimpanan Kontainer Sampah di Sumber Sampah | Rp. | 200.000,- |

Bagian Ketiga

Pelayanan Pemakaman Mayat

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi Pemakaman Mayat digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaman mayat yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis Pelayanan | Tarif |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pelayanan penguburan/pemakaman | |
| | a. Penggalian dan pengurukan | Rp. 50.000,-/makam |
| | b. Pembongkaran makam/pusara | Rp. 100.000,-/makam |

| 1 | 2 | 3 |
|----------|--|-------------------------------------|
| 2. | Sewa tempat pemakaman | |
| | a. Pelayanan Penyediaan Tanah Makam | Rp. 50.000,-/m ² /tahun |
| | b. Pelayanan Penyediaan Tanah Makam Cadangan | Rp. 120.000,-/m ² /tahun |
| | c. Pelayanan Penyediaan Tanah Makam Tumpang | Rp. 50.000,-/m ² /tahun |
| 3. | Pelayanan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan | Rp. 20.000,-/makam/tahun |

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

| | | |
|--|-----|----------|
| a. truck, bus, kontainer dan tronton | Rp. | 10.000,- |
| b. kendaraan barang (box dan sejenisnya) | Rp. | 7.000,- |
| c. kendaraan penumpang dan sejenisnya | Rp. | 2.000,- |
| d. sepeda motor | Rp. | 1.000,- |

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pasar yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

| TIPE PASAR | JENIS OBYEK | TARIF |
|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Skala Kabupaten | a. Kios | |
| | 1. Kelas I | 200,-/m ² /hari |
| | 2. Kelas II | 140,-/m ² /hari |
| | 3. Kelas III | 120,-/m ² /hari |
| | b. Los | 600,-/hari |
| | c. Pelantaran | 600,-/m ² /hari |
| Skala Kecamatan | a. Kios | |
| | 1. Kelas I | 130/m ² /hari |
| | 2. Kelas II | 120/m ² /hari |
| | 3. Kelas III | 110/m ² /hari |
| | b. Los | 600/hari |
| | c. Pelantaran | 600/m ² /hari |

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pengujian Berkala Pertama:
 1. Mobil Penumpang Umum Mobil Bus, Mobil Barang Rp. 150.000,-
 2. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp. 125.000,-
 - b. Pengujian Berkala Ulang per 6 (enam) bulan:
 1. Mobil Bus dan Mobil Barang Rp. 100.000,-
 2. Mobil Penumpang Umum Rp. 80.000,-
 3. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp. 100.000,-
 - c. Pengujian kendaraan bermotor bukan wajib uji Rp. 80.000,-
 - d. Biaya Pengganti Buku Pengujian/Plat Uji atau Sebutan Lainnya
 1. hilang atau rusak Rp. 75.000,-
 2. kendaraan ganti identitas Rp. 50.000,-
 3. habis masa berlaku Rp. 50.000,-

Bagian Ketujuh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 34

- (1) Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat-alat pemadam kebakaran yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis | Ukuran | Tarif |
|----|--|--------------------|-------------|
| 1. | Dry Chemical, CO2, Halon 1211 Foam/Busa dan Jenis Lainnya | 1 kg s/d 5 kg | Rp. 3.100,- |
| | | 5,1 kg s/d 10 kg | Rp. 4.250,- |
| | | 10,1 kg s/d 40 kg | Rp. 4.750,- |
| | | 40,1 kg s/d 100 kg | Rp. 5.250,- |
| 2. | Sprinkler | Pertitik Alat | Rp. 2.100,- |
| 3. | Smoke Detector | Pertitik Alat | Rp. 2.100,- |
| 4. | Alarm Sistem | Pertitik Alat | Rp. 3.100,- |
| 5. | Fire Hydran | Pertitik Alat | Rp. 7.250,- |

Bagian Kedelapan
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 35

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis penggantian biaya cetak peta yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

| Jenis Peta | Kertas | Ukuran | Tarif | |
|--------------------------------------|--------------|--------|----------|-------------|
| | | | Berwarna | Hitam Putih |
| Peta yang disediakan oleh Pemerintah | HVS Biasa | A4/F4 | 15.000 | 10.000 |
| | | A3 | 30.000 | 15.000 |
| | | A2 | 71.000 | 35.000 |
| | | A1 | 186.000 | 95.000 |
| | | A0 | 280.000 | 140.000 |
| | Glossy Paper | A4/F4 | 23.000 | 14.000 |
| | | A3 | 45.000 | 21.000 |
| | | A2 | 106.000 | 50.000 |
| | | A1 | 280.000 | 133.000 |
| | | A0 | 350.000 | 180.000 |
| | Kalkir | A4/F4 | - | 13.000 |
| | | A3 | - | 20.000 |
| | | A2 | - | 45.000 |
| | | A1 | - | 123.000 |
| | | A0 | - | 182.000 |
| Siteplan dan Gambar Bangunan | HVS Biasa | A4/F4 | 20.000 | 10.000 |
| | | A3 | 40.000 | 20.000 |
| | | A2 | 85.000 | 45.000 |
| | | A1 | 200.000 | 100.000 |
| | | A0 | 280.000 | 150.000 |
| | Glossy Paper | A4/F4 | 30.000 | 15.000 |
| | | A3 | 60.000 | 30.000 |
| | | A2 | 120.000 | 60.000 |
| | | A1 | 280.000 | 130.000 |
| | | A0 | 400.000 | 196.000 |

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus

Pasal 36

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan berdasarkan volume isi septic tank.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

| NO | UKURAN ISI SEPTIC TANK | TARIF |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | 0,0 m ³ s/d 1,999 m ³ | Rp. 100.000/sekali penyedotan |
| 2 | > 2,0 m ³ s/d 2,999 m ³ | Rp. 110.000/sekali penyedotan |
| 3 | > 3,0 m ³ s/d 3,999 m ³ | Rp. 120.000/sekali penyedotan |
| 4 | > 4,0 m ³ s/d 5,999 m ³ | Rp. 130.000/sekali penyedotan |
| 5 | > 6,0 m ³ s/d 7,999 m ³ | Rp. 190.000/sekali penyedotan |
| 6 | 8 m ³ ke atas | Rp. 260.000/sekali penyedotan |

- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam radius 15 km.
- (4) Apabila lokasi pelayanan penyedotan kakus berjarak melebihi radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,00/km.
- (5) Bagi badan/swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan instalasi pengolahan limbah tinja, dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,00/m³/sekali pelayanan.
- (6) Untuk jasa pelayanan terhadap gangguan penyumbatan saluran kakus ditetapkan tarif Rp. 60.000,00.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan:

| NO | Uraian | Satuan | TERA | | TERA ULANG | |
|----|---|--------|---|-------------|---|-------------|
| | | | Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan | Penjustiran | Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan | Penjustiran |
| | | | Tarif (Rp.) | Tarif (Rp.) | Tarif (Rp.) | Tarif (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | UKURAN PANJANG | | | | | |
| | a. Bahan dari Kayu | | | | | |
| | Sampai dengan 1 m | buah | 500,- | - | 1.000,- | - |
| | b. Bahan dari Logam | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 2 m | buah | 4.000,- | - | 2.000,- | - |
| | 2) Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m | buah | 8.000,- | - | 4.000,- | - |
| | 3) Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan | buah | 8.000,- | - | 4.000,- | - |
| | 4) Ukuran panjang jenis | | | | | |
| | a) Salib Ukur | buah | 10.000,- | - | 5.000,- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|------|-----------|----------|-----------|----------|
| | b) Blok Ukur | buah | 10.000,- | - | 5.000,- | - |
| | c) Mikrometer | buah | 15.000,- | - | 7.500,- | - |
| | d) Jangka Sorong | buah | 10.000,- | - | 5.000,- | - |
| | e) Alat Ukur Tinggi Orang | buah | 10.000,- | - | 5.000,- | - |
| | f) Counter Meter | buah | 15.000,- | - | 15.000,- | - |
| | g) Roll Tester | buah | 100.000,- | - | 75.000,- | - |
| | h) Komparator | buah | 150.000,- | - | 75.000,- | - |
| 2. | ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) | | | | | |
| | a. Mekanik | buah | 50.000,- | 12.500,- | 50.000,- | 12.500,- |
| | b. Elektronik | buah | 100.000,- | 25.000,- | 100.000,- | 25.000,- |
| 3. | TAKARAN (BASAH/KERING) | | | | | |
| | a. Sampai dengan 2 L | buah | 500,- | - | 500,- | - |
| | b. Lebih dari 2 L sampai 25 L | buah | 1.000,- | - | 1.000,- | - |
| | c. Lebih dari 25 L | buah | 2.000,- | - | 2.000,- | - |
| 4. | TANGKI UKUR | | | | | |
| | a. Bentuk Silinder Tegak | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 500 KL | buah | 100.000,- | - | 100.000,- | - |
| | 2) Lebih dari 500 KL dihitung sbb: | | | | | |
| | a) 500 KL pertama | buah | 100.000,- | - | 100.000,- | - |
| | b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap 10 KL | buah | 1.500,- | - | 1.500,- | - |
| | c) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 2.000 KL, setiap 10 KL | buah | 1.000,- | - | 1.000,- | - |
| | d) Selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10.000 KL, setiap 10 KL | buah | 100,- | - | 100,- | - |
| | e) Selebihnya dari 10.000 KL sampai 20.000 KL, setiap 10 KL | buah | 50,- | - | 50,- | - |
| | f) Selebihnya dari 20.000 KL, setiap 10 KL | buah | 30,- | - | 30,- | - |
| | Bagian 10 KL dihitung 10 KL | | | | | |
| | b. Bentuk Bola dan Sferoidal | | | | | |
| | 1. Sampai dengan 500 KL | buah | 200.000,- | - | 200.000,- | - |
| | 2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb: | | | | | |
| | a) 500 KL pertama | buah | 200.000,- | - | 200.000,- | - |
| | b) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap 10 KL | buah | 3.000,- | - | 3.000,- | - |
| | c) Selebihnya 1000 KL, setiap 10 KL | buah | 2.000,- | - | 2.000,- | - |
| | Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|------|-----------|---|-----------|---|
| | c. Bentuk Silinder Datar | | | | | |
| | 1. Sampai dengan 10 KL | buah | 200.000,- | - | 200.000,- | - |
| | 2. Lebih dari 10 KL dihitung sbb: | | | | | |
| | a) 10 KL pertama | buah | 200.000,- | - | 200.000,- | - |
| | b) Selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL, setiap KL | buah | 2.000,- | - | 2.000,- | - |
| | c) Selebihnya dari 50 KL, setiap KL | buah | 1.000,- | - | 1.000,- | - |
| | Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL | | | | | |
| 5. | TANGKI UKUR GERAK | | | | | |
| | a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon | | | | | |
| | 1. Kapasitas sampai dengan 5 KL | buah | 20.000,- | - | 20.000,- | - |
| | 2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb: | | | | | |
| | (1) 5 KL pertama | buah | 20.000,- | - | 20.000,- | - |
| | (2) Selebihnya dari 5 KL, setiap 1 KL | buah | 4.000,- | - | 4.000,- | - |
| | Bagian dari KL dihitung satu KL | | | | | |
| | b. Tangki Ukuran Tongkang, Tangki Ukuran Pindah, Tangki Ukuran Apung dan Tangki Ukuran kapal | | | | | |
| | 1. Kapasitas sampai dengan 50 KL | buah | 80.000,- | - | 80.000,- | - |
| | 2. Lebih dari 50 KL dihitung sbb: | | | | | |
| | a) 50 KL pertama | buah | 80.000,- | - | 80.000,- | - |
| | b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL | buah | 1.200,- | - | 1.200,- | - |
| | c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL | buah | 1.000,- | - | 1.000,- | - |
| | d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL | buah | 700,- | - | 700,- | - |
| | e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL | buah | 500,- | - | 500,- | - |
| | f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL, setiap KL | buah | 200,- | - | 200,- | - |
| | g) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL, setiap KL | buah | 50,- | - | 50,- | - |
| | Bagian dari KL dihitung satu KL tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat | | | | | |
| 6. | ALAT UKUR DARI GELAS | | | | | |
| | a. Labu Ukur, Buret dan Pipet | buah | 20.000,- | - | 20.000,- | - |
| | b. Gelas Ukur | buah | 20.000,- | - | 20.000,- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|------|----------|-----------|----------|----------|
| 7. | BEJANA UKUR | | | | | |
| | a. Sampai dengan 50 L | buah | 20.000,- | 10.000,- | 10.000,- | 5.000,- |
| | b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L | buah | 30.000,- | 15.000,- | 15.000,- | 5.000,- |
| | c. Lebih dari 200 L sampai 500 L | buah | 40.000,- | 20.000,- | 20.000,- | 5.000,- |
| | d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L | buah | 50.000,- | - | 30.000,- | - |
| | e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L | buah | 10.000,- | - | 5.000,- | - |
| | Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L | | | | | |
| 8. | METER TAKSI | buah | 10.000,- | - | 5.000,- | - |
| 9. | SPEDOMETER | buah | 15.000,- | - | 7.500,- | - |
| 10. | METER REM | buah | 15.000,- | - | 7.500,- | - |
| 11. | TACHOMETER | buah | 30.000,- | - | 15.000,- | - |
| 12. | THERMOMETER | buah | 6.000,- | - | 3.000,- | - |
| 13. | DENSIMETER | buah | 6.000,- | - | 3.000,- | - |
| 14. | VISKOMETER | buah | 6.000,- | - | 3.000,- | - |
| 15. | ALAT UKUR LUAS | buah | 5.000,- | - | 2.500,- | - |
| 16. | ALAT UKUR SUDUT | buah | 5.000,- | - | 2.500,- | - |
| 17. | ALAT UKUR CAIRAN MINYAK | | | | | |
| | Meter bahan bakar minyak | | | | | |
| | a. Meter induk untuk setiap media uji | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 25 m ³ /h | buah | 60.000,- | 20.000,- | 60.000,- | 20.000,- |
| | 2) Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb: | | | | | |
| | a) 25 m ³ /h pertama | buah | 60.000,- | 20.000,- | 60.000,- | 20.000,- |
| | b) Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h | buah | 4.000,- | - | 4.000,- | - |
| | c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h | buah | 2.000,- | - | 2.000,- | - |
| | d) Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 1.000,- | - | 500,- | - |
| | Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h | | | | | |
| | b. Meter Kerja | | | | | |
| | Untuk setiap media uji coba | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 15 m ³ /h | buah | 40.000,- | 10.000,- | 40.000,- | 10.000,- |
| | 2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb: | | | | | |
| | a) 15 m ³ /h perama | buah | 40.000,- | 100.000,- | 20.000,- | 10.000,- |
| | b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h | buah | 2.000,- | - | 1.000,- | - |
| | c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h | buah | 1.000,- | - | 500,- | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|------|----------|----------|----------|----------|
| | d) Lebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h | buah | 300,- | - | 500,- | - |
| | Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h | | | | | |
| 18. | ALAT UKUR GAS | | | | | |
| | c. Pompa Ukur BBM | buah | 40.000,- | 10.000,- | 20.000,- | 5.000,- |
| | a. Meter induk | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 100 m ³ /h | buah | 20.000,- | 10.000,- | 20.000,- | 10.000,- |
| | 2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb: | | | | | |
| | a) 100 m ³ /h pertama | buah | 20.000,- | 10.000,- | 20.000,- | 10.000,- |
| | b) Lebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h | buah | 1.000,- | - | 1.000,- | - |
| | c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h | buah | 500,- | - | 500,- | - |
| | d) Lebihnya dari 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h | buah | 200,- | - | 200,- | - |
| | e) Lebihnya dari 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h | buah | 100,- | - | 100,- | - |
| | Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h | | | | | |
| | b. Meter Kerja | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 50 m ³ /h | buah | 2.000,- | - | 2.000,- | - |
| | 2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb: | | | | | |
| | a) 50 m ³ /h pertama | buah | 2.000,- | - | 2.000,- | - |
| | b) Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h | buah | 200,- | - | 200,- | - |
| | c) Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h | buah | 150,- | - | 150,- | - |
| | d) Lebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h | buah | 100,- | - | 100,- | - |
| | e) Lebihnya dari 2000 KL m ³ /h setiap 10 m ³ /h | buah | 50,- | - | 50,- | - |
| | Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h | | | | | |
| 19. | METER AIR | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 15 m ³ /h | buah | 20.000,- | 10.000,- | 20.000,- | 10.000,- |
| | 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | 40.000,- | 20.000,- | 40.000,- | 20.000,- |
| | 3) Lebih dari 100 m ³ /h | buah | 50.000,- | 25.000,- | 50.000,- | 25.000,- |
| | b. Meter Kerja | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 10 m ³ /h | buah | 500,- | 250,- | 1.000,- | 500,- |
| | 2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | 4.000,- | 2.000,- | 4.000,- | 2.000,- |
| | 3) Lebih dari 100 m ³ /h | buah | 10.000,- | 5.000,- | 10.000,- | 5.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|------|-----------|----------|-----------|----------|
| 20. | METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR | | | | | |
| | a. Meter Induk | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 15 m ³ /h | buah | 30.000,- | 15.000,- | 30.000,- | 15.000,- |
| | 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | 50.000,- | 25.000,- | 50.000,- | 25.000,- |
| | 3) Lebihnya dari 100 m ³ /h | buah | 60.000,- | 30.000,- | 60.000,- | 30.000,- |
| | b. Meter Kerja | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 15 m ³ /h | buah | 1.500,- | 750,- | 1.500,- | 750,- |
| | 2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h | buah | 5.000,- | 2.500,- | 5.000,- | 2.500,- |
| | 3) Lebihnya dari 100 m ³ /h | buah | 12.000,- | 6.000,- | 12.000,- | 6.000,- |
| 21. | PEMBATAS ARUS AIR | buah | 1.000,- | 500,- | 1.000,- | 500,- |
| 22. | ALAT KOMPENSASI : SUHU ATC TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA | buah | 10.000,- | 5.000,- | 10.000,- | 5.000,- |
| 23. | METER PROVER | | | | | |
| | a. Sampai dengan 2.000 L | buah | 100.000,- | - | 100.000,- | - |
| | b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L | buah | 200.000,- | - | 200.000,- | - |
| | c. Lebih dari 10.000 L | buah | 300.000,- | - | 300.000,- | - |
| | Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur | | | | | |
| 24. | METER ARUS MASSA | | | | | |
| | Untuk Setiap Media Uji: | | | | | |
| | a. Sampai dengan 10 kg/min | buah | 50.000,- | 10.000,- | 50.000,- | 10.000,- |
| | b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb: | | | | | |
| | 1) 10 kg/min pertama | buah | 50.000,- | 10.000,- | 50.000,- | 10.000,- |
| | 2) Selebihnya dari 100 kg/min, setiap kg/min | Buah | 500,- | - | 500,- | - |
| | 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min | buah | 200,- | - | 200,- | - |
| | 4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min | buah | 100,- | - | 100,- | - |
| | 5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min | buah | 50,- | - | 50,- | - |
| | Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min | | | | | |
| 25. | ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) | | | | | |
| | Untuk setiap jenis media | | | | | |
| | Sampai dengan 4 alat pengisi | buah | 30.000,- | 10.000,- | 20.000,- | 10.000,- |
| 26. | METER LISTRIK (METER KWH) | | | | | |
| | a. Kelas 0,2 atau kurang | | | | | |
| | 1) 3 (tiga) phasa | Buah | 40.000,- | 15.000,- | 40.000,- | 15.000,- |
| | 2) 1 (satu) phasa | Buah | 12.000,- | 5.000,- | 12.000,- | 5.000,- |
| | b. Kelas 0,5 atau kelas 1 | | | | | |
| | 1) 3 (tiga) phasa | Buah | 5.000,- | 2.000,- | 5.000,- | 2.000,- |
| | 2) 1 (satu) phasa | buah | 1.500,- | 600,- | 1.500,- | 600,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|------|----------|---------|----------|---------|
| | c. Kelas 2 | | | | | |
| | 1) 3 (tiga) phasa | buah | 3.000,- | 1.200,- | 3.000,- | 1.200,- |
| | 2) 1 (satu) phasa | buah | 1.000,- | 400,- | 1.000,- | 400,- |
| 27. | Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan c | buah | - | - | - | - |
| 28. | PEMBATAS ARUS LISTRIK | buah | 1.000,- | 500,- | 1.000,- | 500,- |
| 29. | STOP WATCH | buah | 3.000,- | - | 2.000,- | - |
| 30. | METER PARKIR | buah | 6.000,- | 2.500,- | 6.000,- | 2.500,- |
| 31. | ANAK TIMBANGAN | | | | | |
| | a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 1 kg | buah | 1.000,- | 300,- | 500,- | 300,- |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | buah | 800,- | 300,- | 800,- | 200,- |
| | 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 2.000,- | 500,- | 1.000,- | 300,- |
| | b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 1 kg | buah | 2.000,- | 500,- | 1.000,- | 300,- |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | buah | 4.000,- | 1.000,- | 2.000,- | 500,- |
| | 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | buah | 10.000,- | 2.500,- | 5.000,- | 1.000,- |
| | c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 1 kg | Buah | 10.000,- | 2.500,- | 5.000,- | 1.000,- |
| | 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg | Buah | 15.000,- | 5.000,- | 7.500,- | 2.500,- |
| | 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg | Buah | 20.000,- | 7.500,- | 10.000,- | 5.000,- |
| 32. | TIMBANGAN | | | | | |
| | a. Sampai dengan 3.000 kg | | | | | |
| | 1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV) | | | | | |
| | a) Sampai dengan 25 kg | buah | 3.000,- | 500,- | 1.500,- | 500,- |
| | b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg | buah | 4.000,- | 1.000,- | 2.000,- | 1.000,- |
| | c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg | buah | 6.000,- | 1.500,- | 3.000,- | 1.000,- |
| | d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | buah | 8.000,- | 2.500,- | 4.000,- | 1.500,- |
| | e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg | buah | 20.000,- | 5.000,- | 10.000,- | 3.000,- |
| | 2) Ketelitian Halus (Kelas II) | | | | | |
| | a) Sampai dengan 1 kg | buah | 10.000,- | 5.000,- | 7.500,- | 2.500,- |
| | b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg | buah | 12.000,- | 6.000,- | 10.000,- | 3.000,- |
| | c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg | buah | 14.000,- | 7.000,- | 12.000,- | 6.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg | buah | 16.000,- | 8.000,- | 14.000,- | 7.000,- |
| | e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3.000 kg | buah | 20.000,- | 10.000,- | 18.000,- | 9.000,- |
| | 3) Ketelitian Khusus (Kelas I) | buah | 36.000,- | 15.000,- | 24.000,- | 12.000,- |
| | b. Lebih dari 3.000 kg | | | | | |
| | 1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton | buah | 5.000,- | 2.000,- | 2.000,- | 1.000,- |
| | 2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton | buah | 6.000,- | 2.500,- | 4.000,- | 2.500,- |
| | c. Timbangan ban berjalan | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 100 ton/h | buah | 100.000,- | 50.000,- | 100.000,- | 50.000,- |
| | 2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h | buah | 200.000,- | 100.000,- | 200.000,- | 100.000,- |
| | 3) Lebih besar dari 500 ton/h | buah | 300.000,- | 150.000,- | 300.000,- | 150.000,- |
| | d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 32a, 32b dan 32c | | | | | |
| 33. | a. Dead Weight Testing Machine | | | | | |
| | 1) Sampai dengan 100 kg/cm ² | buah | 5.000,- | - | - | - |
| | 2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | buah | 10.000,- | - | - | - |
| | 3) Lebih dari 1.000 kg/cm ² | buah | 15.000,- | - | - | - |
| | b. 1) Alat ukur tekanan darah | buah | 20.000,- | - | 15.000,- | - |
| | 2) Manometer minyak | | | | | |
| | a) Sampai dengan 100 kg/cm ² | buah | 5.000,- | 2.500,- | 2.500,- | 1.000,- |
| | b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | buah | 7.500,- | 3.000,- | 5.000,- | 2.500,- |
| | c) Lebih dari 1.000 kg/cm ² | buah | 10.000,- | 5.000,- | 7.500,- | 3.000,- |
| | 3) Pressure Calibrator | buah | 20.000,- | 10.000,- | 20.000,- | 10.000,- |
| | 4) Pressure Recorder | | | | | |
| | a) Sampai dengan 100 kg/cm ² | Buah | 5.000,- | 2.500,- | 5.000,- | 2.500,- |
| | b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ² | Buah | 10.000,- | 5.000,- | 10.000,- | 5.000,- |
| | c) lebih dari 1.000 kg/cm ² | Buah | 15.000,- | 7.500,- | 15.000,- | 7.500,- |
| 34. | PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDER) OTOMATIS | Buah | 10.000,- | 5.000,- | 2.500,- | 1.500,- |
| 35. | METER KADAR AIR | | | | | |
| | a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi | Buah | 10.000,- | 2.500,- | 5.000,- | 2.500,- |
| | b. Untuk biji-bijian mengandung minyak kapas dan tekstil setiap komoditi | Buah | 15.000,- | 5.000,- | 7.500,- | 3.000,- |
| | c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi | Buah | 20.000,- | 10.000,- | 10.000,- | 5.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|------|---------|---|---------|---|
| 36. | Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 27 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam Bagian dari jam dihitung 1 jam | Buah | 2.500,- | - | 2.500,- | - |

| NO | URAIAN | SATUAN | TARIF (Rp.) |
|----|---|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | Biaya penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada Point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam | Jam | 2.500,- |
| C. | Biaya tambahan | | |
| | 1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu : | | |
| | a) Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan/atau lebih 25 kg | Buah | 2.500,- |
| | b) Timbangan cepat, pengisis (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas | Buah | 5.000,- |
| | c) Timbangan elektronok untuk semua kapasitas | Buah | 7.500,- |
| | 2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut | Buah | 3.500,- |
| | 3. UTTP yang ditanam | Buah | 2.500,- |
| | 4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus | Buah | 3.000,- |
| | 5. UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik | | |
| | a. Pompa Ukuran BBM | Buah | 100.000,- |
| | b. Timbangan Mekanik kapasitas: | | |
| | 1) sampai dengan 25 kg | Buah | 25.000,- |
| | 2) lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg | Buah | 50.000,- |
| | 3) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg | Buah | 75.000,- |
| | 4) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | Buah | 100.000,- |
| | 5) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg | Buah | 125.000,- |
| | c. Timbangan Elektronik kapasitas: | | |
| | 1) sampai dengan 25 kg | Buah | 25.000,- |
| | 2) lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg | Buah | 50.000,- |
| | 3) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg | Buah | 75.000,- |
| | 4) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg | Buah | 100.000,- |
| | 5) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg | Buah | 125.000,- |
| | d. Timbangan Jembatan kapasitas: | | |
| | 1) lebih kecil dari 20.000 kg | Buah | 500.000,- |
| | 2) dari 20.000 kg - 50.000 kg | Buah | 750.000,- |
| | 3) lebih dari 50.000 kg - 100.000 kg | Buah | 1.000.000,- |
| | e. Timbangan Pengisian kapasitas: | | |
| | 1) 1 kg - 200 kg | Buah | 100.000,- |
| | 2) 201 kg - 500 kg | Buah | 150.000,- |
| | 3) 501 kg - 1.000 kg | Buah | 350.000,- |
| | 4) 1.001 kg - 5.000 kg | Buah | 750.000,- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|---------|-------------|
| | f. Tangki Ukur Mobil kapasitas: | | |
| | 1) Sampai dengan 5.000 liter | Buah | 500.000,- |
| | 2) 5.001 liter – 8.000 liter | Buah | 600.000,- |
| | 3) 8.001 liter – 16.000 liter | Buah | 1.200.000,- |
| | 4) 16.001 liter – 24.000 liter | Buah | 1.800.000,- |
| | 5) 24.001 liter – 32.000 liter | Buah | 2.400.000,- |
| | g. Meter Arus Kerja | Unit | 250.000,- |
| | h. Tangki Ukuran Silinder: | | |
| | 1) Tangki Ukuran Silinder Datar | Liter | 100,- |
| | 2) Tangki Ukuran Silinder Tegak | Liter | 10,- |
| | i. Meter Kadar Air: | Unit | 50.000,- |
| | j. Ukur Arus: | | |
| | 1) Meter kWh 1 Fasa | Buah | 1.000,- |
| | 2) Meter kWh 3 Fasa | Buah | 11.500,- |
| | 3) Meter Air Rumah tangga | Buah | 700,- |
| | 4) Meter Air Industri | Buah | 187.500,- |
| | k. Bejana Ukur | | |
| | 1) 5 liter – 20 liter | Buah | 150.000,- |
| | 2) 50 liter – 20 liter | Buah | 500.000,- |
| | 3) 200 liter – 500 liter | Buah | 750.000,- |
| | 4) 1.000 liter – 5.000 liter | Buah | 1.000.000,- |
| | l. Meter Taksi | Unit | 50.000,- |
| | m. Counter Meter | Unit | 25.000,- |
| | n. Pengujian BDKT: | | |
| | 1) pengisian otomatis | Kemasan | 50.000,- |
| | 2) pengisian manual | Kemasan | 25.000,- |
| | 6. Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP) | Lembar | 5.000,- |
| D. | 1. Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) menggunakan mesin pengisi/otomatis | Kemasan | 50.000,- |
| | 2. Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus tidak menggunakan mesin pengisi/manual | Kemasan | 10.000,- |

Bagian Kesebelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan:

- TP = Tingkat Penggunaan Jasa
 = Frekuensi Kunjungan (FKj)

TR = Tarif Retribusi

$$iSPK \times iTM \times BOz$$

iSPK = Indeks Sistem Pusat Kegiatan (RTRW)

iTM = Indeks Tinggi Menara

BOz = Biaya Operasional Zonasi *

$$(iZj \times (Ho + Um + Tr)) + ATK$$

iZj = Indeks Zonasi Jarak (A,B,C,D)

Ho = Honorarium

Um = Uang Makan

Tr = Transportasi

ATK = Alat Tulis Kantor

* Mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai frekuensi kunjungan, indeks sistem pusat kegiatan (RTRW), indeks tinggi menara dan indeks zonasi jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai komponen biaya operasional zonasi, yang terdiri dari honorarium, uang makan, transportasi dan alat tulis kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

BAB VIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tempat Pemungutan

Pasal 39

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga**Penagihan****Pasal 41**

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat**Pemanfaatan****Pasal 42**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Kelima**Keberatan****Pasal 43**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 44

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 45

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 50

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi jasa umum dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis retribusi jasa umum.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 54

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) merupakan Penerimaan Kas Daerah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 8);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 3); dan

3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 10 - 10 - 2016
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 10 - 10 - 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 10**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:
(10/203/2016)**